



- Balita Daycare Diikat Sesuai Perintah Pimpinan Yayasan
- Isak Tangis Ortu Pecah di Hadapan Menteri PPA

JOGJA - Isak tangis para orang tua yang anaknya menjadi korban kekerasan di Daycare Little Aresha Jogja pecah saat jumpa pers di Mapolresta Jogja, Senin (27/4) sore. Para orang tua ikut hadir dalam acara yang biasanya hanya dihadiri untuk kalangan wartawan itu



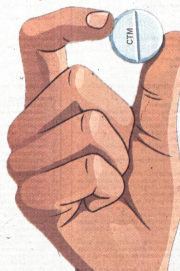
TALI PENGIRAT Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifol Cholis Fuzuli (Biri) memegang salah satu barang bukti disamping Kapolresta Jogja Kombes Pol Eva Guna Pandia saat rilis pengungkapan kasus kekerasan terhadap anak oleh Daycare Little Aresha, di Mapolresta Jogja, kemarin (27/4).

KASUS KEKERASAN ANAK DI DAYCARE LITTLE ARESHA

- KPAI mencatat sebagai kasus kekerasan anak di daycare dengan jumlah korban terbanyak dalam sejarah nasional yakni 53 anak.
- Ada tindakan tidak manusiawi berupa penyiksaan berupa pengikatan tali dari tangan menggunakan tali dari pagi hingga pagi pulang kepada anak.
- Penyiksaan karena motif ekonomi karena pihak yayasan mengijazkan keuntungan dengan menerima siswa sebanyak mungkin tanpa memperhatikan risiko pengasuh.
- Satu pengasuh dipaksa menangan 7 hingga 10 anak, sehingga menyekolahkan kekerasan agar anak-anak mudah diendahkan karena pengasuh kewalahan.
- Pengelola yayasan diduga melewatkan kekerasan serta memberikan doktrin kepada anak agar tidak mengadu kepada orang tua.
- Tersangka dijerat UU Perlindungan Anak dan KUHP dengan ancaman hukuman pokok 5 tahun yang ditambah seoptimal mungkin 8 tahun karena adanya pembatasan. Serta ada kemungkinan ancaman pasal korupsi dari pasal lain.
- Anak-anak mengalami trauma mendalam, ketakutan melihat orang shalat, hingga takut anak mengadu kepada orang tua. Beberapa korban juga mengalami keterlambatan pertumbuhan dan kesulitan komunikasi dua arah.
- Langkah darurat Pemkot Jogja dengan menyediakan 15 daycare alternatif di area penutupan Little Aresha dan menanggung biaya pengasuh.
- Melakukan sweeping terhadap daycare; ditemukan 23 tempat penitipan anak di Jogja belum betim.

Pusat Kawal Kasus Ini, Evaluasi Seluruh Indonesia

Harapan saya itu yang pertama dan terakhir. Jangan sampai terjadi lagi." Hamengku Buwono X Gubernur DIJ



PEMERINTAH pusat dipastikan ikut mengawal kasus dugaan kekerasan anak yang terjadi di Daycare Little Aresha, Umbulharjo, Kota Jogja. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat menghadiri acara di UGM, Senin (27/4).

POLISI MENETAPKAN 13 TERANGKA, SEMUANYA PEREMPUAN

- DK (5) asal Serwon, Bantul (Kelas Yayasan)
- AP (42) asal Gedongtengen, Kota Jogja (Kepala Sekolah)
- FN (26) asal Boyolali, Jawa Tengah
- NF (26) asal Kasihan, Bantul
- Lis (34) asal Karanganyar, Jawa Tengah
- EN (26) asal Imogiri, Bantul
- SHM (84) asal Umbulharjo, Kota Jogja
- DR (22) asal Kasihan, Bantul
- HR (47) asal Sedayu, Bantul
- ZA (30) asal Pengasih Kulon Progo
- SR (50) asal Mengangen Kota Jogja
- DO (19) asal Banguntapan, Bantul
- DM (28) asal Sarolangun, Jambi

Polisi Dalami Penggunaan CTM

Sambungan dari hal 1

Mereka menyampaikan keluhan kesahnyanya kepada jajaran pejabat yang hadir. Mulai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arif Fauzi, Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo, Kapolresta Jogja Kombes Pol Eva Guna Pandia, Ketua DPRD Kota Jogja Wisnu Sabdono Putro, hingga komisioner Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (KPAI) Diah Puspitarini.

Tangisan sedih tak terbedung saat orang tua menceritakan trauma mendalam yang dialami buah hatinya itu. Beberapa di antaranya mengungkapkan anaknya mengalami keterlambatan pertumbuhan. Selain itu adanya doktrin dari pengasuh *daycare* agar anak tidak menyampaikan kekerasan itu kepada orang tua mereka.

Setya misalnya. Salah satu orang tua ini berharap agar aparat penegak hukum dan pemerintah mengusut tuntas dugaan doktrin yang diberikan oleh pengasuh *daycare*. Dia khawatir trauma yang didapatkan anaknya bisa terbawa hingga dewasa kelak.

"Yang kami takutkan ketika mereka mendapati, maaf, hal yang serupa di masa depan, mereka tahunya akan takut untuk *speak up* gitu kepada kami orang tua atau pun kepada orang yang lebih dewasa," ujar Setya.

Salah satu kakak anak korban *daycare* berinisial A bahkan sempat mengungkapkan keanehan yang diderita adiknya sejak dititipkan di Little Aresha mulai tahun 2023 lalu. Yakni selalu takut ketika melihat orang salat.

Kemudian juga mengalami kesulitan berkomunikasi dua arah hingga umur dua tahun. Dia menduga hal itu disebabkan karena perlakuan yang tidak pantas selama di *daycare*. "Saya mohon, minta seadil-adilnya

untuk para korban dengan menghukum para pelaku sesuai perbuatannya kepada adik saya dan anak-anak lainnya," harap A.

Orang tua lain, Usi mengungkapkan, pengelola Little Aresha kerap memberikan manipulasi kepada para orang tua anak dengan tujuan menutupi tindakan kekerasan yang dilakukan. Dia juga mendesak kepolisian untuk mendalami peran pengasuh lainnya yang bekerja di tempat tersebut.

Usi mempertanyakan mengapa 17 pengasuh lainnya belum terseret dalam proses hukum, padahal diduga mereka melihat dan membiarkan terjadinya aksi kekerasan. Lantas mereka membiarkan tindakan penyalakan dan kekerasan terhadap anak yang dititipkan di *daycare*.

"Beliau-beliau ini tuh juga di situ melihat, membiarkan teman-temannya melakukan seperti itu," ungkapnya.

Menteri PPPA Arif Fauzi Choiri menyampaikan keprihatinannya terhadap kekerasan anak yang terjadi di salah satu lembaga pengasuhan di Kota Jogja ini. Dia menegaskan, segala bentuk kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi yang serius dan tidak dapat ditoleransi dalam kondisi apa pun.

Berdasarkan analisa sementara, Arif menilai motif ekonomi diduga kuat menjadi pendorong utama di balik tindakan tidak bertanggung jawab tersebut. Yakni mengejar target untuk mendapatkan pemasukan, sehingga pengasuh mengabaikan berbagai cara.

Guna mengantisipasi terulangnya kejadian serupa, Kementerian PPPA telah resmi mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) PPPA Nomor 4 Tahun 2024 tentang Standar Daycare. Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan memastikan kualitas layanan asuhan anak di

seluruh Indonesia.

Kapolresta Jogja Kombes Pol Eva Guna Pandia mengungkapkan, pihaknya sudah menetapkan 13 tersangka dalam kasus ini. Semuanya perempuan, termasuk DK selaku ketua yayasan dan AP sebagai kepala sekolah. Kemudian 11 tersangka lain merupakan pengasuh dengan inisial FN, NF, LIS, EN, SRM, DR, HP, ZA, SRJ, DO, dan DM. Pihaknya juga akan mendalami peran pengasuh lain yang belum ditetapkan tersangka.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, Eva Guna mengungkapkan, kekerasan yang dilakukan terhadap anak-anak itu dipicu oleh alasan ketertiban dan motif ekonomi. Polisi juga membenarkan foto-foto yang beredar di media sosial merupakan kondisi anak-anak di Little Aresha.

"Karena anak-anak ini masih kecil, (tersangka) takut mereka mengganggu yang lain, sehingga dilakukan pengikatan pada bagian tali ataupun kaki," jelas Eva.

Para tersangka diberatkan Pasal 76A Jo Pasal 77 atau Pasal 76B Jo Pasal 77 B atau Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 20, Pasal 21 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang dugaan tindak pidana memperlakukan anak secara diskriminatif atau menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melakukan salah dan penelantaran atau kekerasan terhadap anak. Kasar Reskrim Polresta Jogja Kompol Riski Adrian mengungkapkan, tindakan tidak manusiawi berupa pengikatan anak-anak itu dilakukan atas perintah langsung pimpinan yayasan. Polisi menduga kuat adanya motif ekonomi di balik tindakan kekerasan ini. Karena pihak yayasan terus menerima pendaftaran siswa

baru tanpa mempertimbangkan rasio pengasuh dan anak.

"Satu orang pengasuh dipaksa meng-handle tujuh sampai delapan anak, bahkan ada dua pengasuh yang harus memegang hingga 20 anak. Karena kewalahan memandikan dan memakaikan baju, mereka diperingatkan melakukan perbuatan tidak manusiawi itu agar anak-anak mudah dikendalikan," jelas Riski.

Riski menyebut, pihak yayasan menjanjikan rasio satu pengasuh hanya untuk dua hingga tiga anak kepada orang tua. Tarif yang dikenakan pun beragam, mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta. Tergantung paket waktu yang dipilih pada hari kerja atau akhir pekan.

Berdasarkan hasil visum terhadap tiga anak, ditemukan luka di bagian pergelangan tangan yang diduga kuat berasal dari bekas ikatan tali. "Anak-anak diikat sampai jam pulang. Ikatan baru dilepas saat waktu makan atau mandi. Bahkan saat akan difoto untuk laporan dokumentasi kepada orang tua, baju mereka baru dipakaikan agar terlihat normal," tambahnya.

Hingga kini data kepolisian mencatat ada 103 anak yang terdaftar di yayasan itu, dengan 53 anak diduga telah menjadi korban kekerasan. Polisi juga masih mendalami dugaan penggunaan obat-obatan seperti CTM agar anak-anak tetap tenang/tertidur dengan berkoordinasi bersama ahli medis dan psikiater.

Riski memastikan para tersangka kini telah ditahan. Mereka kemungkinan juga diancam pasal dan hukuman berlapis. "Ancaman hukuman pokoknya 5 tahun, namun karena ada pemberatan di UU Tahun 2021, ditambah sepertiga menjadi sekitar 8 tahun. Kami juga memasukkan pasal korporasi serta penambahan dua pasal lagi

hasil koordinasi dengan KPAI,"

beber perwira polisi dengan KPAI tangani-mulai dari Depok, Pekanbaru, hingga Jakarta-jumlah korban di Jogja ini adalah yang paling banyak di seluruh Indonesia," beber Diah.

Sementara itu, Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo menyampaikan bahwa pemkot berkomitmen menanggapi dampak psikis dan fisik anak-anak serta orang tua yang menjadi korban. Ada empat langkah darurat yang di-

ambil untuk menjamin keberlangsungan pengasuhan dan pemulihan para korban.

Langkah pertama yang diambil adalah menyediakan tempat penitipan alternatif bagi anak-anak korban. Hasto menyebut telah mengidentifikasi 15 *daycare* atau tempat penitipan anak (TPA) di sekitar lokasi kejadian yang mampu menampung hingga 78 anak. (Inu/ayu/laz/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Kesehatan			
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan			

Yogyakarta, 18 Mei 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005